Agar Bansos Tepat Sasaran, Perangkat Desa Wajib Mutakhirkan Data Kependudukan Secara Berkala

Senin, 18 Juli 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menekankan pentingnya verifikasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Plh. Bupati Mujib Imron meminta Perangkat Desa, Pendamping Desa, dan Pendamping PKH untuk melakukan verifikasi data secara berkala dan melaporkan perubahan kepada Dispendukcapil. Validitas data sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan penyaluran bantuan sosial dan mencegah kesalahan penargetan.

Verifikasi dan pembaruan data kependudukan penting dilakukan secara tertib karena menjadi referensi data penerima bantuan sosial. Kolaborasi erat antara Dinas Sosial, Pemerintah Desa, dan Dispendukcapil dibutuhkan untuk memperoleh bank data yang selalu ter-update. Semua Perangkat Daerah, termasuk Dinas Sosial, juga diminta untuk memiliki Call Center dan selalu memperbarui data penerima bantuan sosial untuk memudahkan akses masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 131.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia Cabang Pasuruan dengan besaran Rp 600 Ribu Rupiah per KPM untuk tiga bulan. Hingga saat ini, 129.271 KPM sudah menerima BLT, dengan capaian 98,53%.

Penyaluran BLT kepada 1.923 KPM belum terlaksana karena berbagai faktor, seperti alamat tidak ditemukan, penerima berada di luar kota, ganda dalam satu KK, meninggal, KK Tunggal, kondisi ekonomi penerima mampu, penolakan, pindah alamat, atau penerima sudah mendapatkan bantuan serupa dari program lain.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendorong sinergi yang kuat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran aktif masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan sosial di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bantuan sosial mencapai penerima yang tepat dan mencegah penyalahgunaan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.